

DAFTAR PUSTAKA

- Cansil CTS, 2002 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Agraria; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pelaksanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Ediwarman, 2014, *Metodologi penelitian Hukum (panduan penulisan tesis dan Disertasi)*
- Gunawan Widjaja. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.
- G Karta Sapoetra, 1992, *Permasalahan Tanah di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Harsono Budi, 1970, *Tafsiran Undang undang Pokok agraria, sejarah penyusunan, isi dan Pelaksanaanya*, penerbit Jembatan Jakarta.
-, 2003, *Tafsiran Undang undang Pokok agraria, sejarah penyusunan, isi dan Pelaksanaanya*, penerbit Jembatan Jakarta.
-, 2002, *Hukum Agraria, Himpunan Peraturan Peraturan Hukum Tanah*, Penerbit Jembatan Edisi Revisi, Jakarta
- Hartono, Sunaryati 1978, *beberapa pemikiran kearah pembaharuan hukum tanah*, Alumni, Bandung
- Kamus besar Bahasa Indonesia, 2001, Edisi ke Tiga, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta
- Masjchun Sofwan Sri Soedewi, 1978, *Seminar Hipotik dan lembaga jaminan lain*, Universitas Gajah Mada Yogyakarta
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2008 *Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta,
- Muchsin, 2005, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta,
- Parlindungan A.P, 1978, *Komentar atas Undang Undang Pokok agraria*, cetakan Pertama, Penerbit Alumni Bandung
- _____, *Pedoman Pelaksanaan UUPA dan tata cara Pejabat Pembuat Akta Tanah* Cetakan ke 4, penerbit alumni Bandung
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar penelitian Hukum* Jakarta, UI Press

- Soimin Sudharyo, 2001 *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Edisi Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta,
- Sihombing BF, *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta,
- Soetopo, 1981, *Pedoman Jual Beli Tanah Peralihan Hak dan Sertifikat*, Penerbit Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang
- Sumarjono, Maria, S, 1982, *Puspita Serangkum, Aneka Masalah Hukum Agraria*, Penerbit Andi Offset Yogyakarta
-, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Soimin, Sudharyo *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Edisi Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 24
- Supriadi, 2008, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta
- Riduwan, 2002, *Skala Pengukuran variabel-variabel Penelitian*, Penerbit Alfabeta, Bandung
- Rahardjo Satjipto, 2010, *Sosiologi Hukum*, Penerbit Genta Publising, Bandung
-, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Wantjik Saleh K, 1981, *Hukum Acara Perdata RVG/HIR*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum* Penerbit Kencana Pranada Media Group,

II. Perundang Undangan

- Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945
Ketetapan MPR No IX MPR Tahun 2001 yaitu pengelolaan sumber daya alam
- Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960
- Undang Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah
dan Benda-Benda yang ada di atasnya
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
bangunan dan hak pakai

Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Perpres Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian

Keputusan Pemberian Hak atas Tanah serta PMA, K BPN No 1 Tahun 1999 tentang Tata cara penyelesaian sengketa pertanahan

Keppres Nomor 55/1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2003, tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan,

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tersebut, kewenangan pemberian Hak Guna Usaha tidak dilimpahkan pada Kantor Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 Tata Cara Pemberian Hak Guna Usaha

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi.

III. Majalah, Koran

Syaiful Bahri, Negara dan hak rakyat untuk tanah, Harian Kompas Tanggal 13 Mei 2005

Roeroe S.D.L: Penegakan Hukum Vol.I/No.6/Okttober-Desember /2013 Edisi Khusus”

Jurnal Dinamika Hukum Volume 14 Nomor 1 Januari 2014

IV. Internet

www.property.net, diakses pada tanggal 12 November 2014.

<http://3bp.blogspot.com/-j8> diakses 15 Maret 2015



DAFTAR TABEL

- 1. Tabel 1. Nama nama Kelompok Tani yang memperoleh bagian atas Landreform SK No 01 sampai dengan 022/ LR/1970**
- 2. Tabel 2. Data Pemohon sertifikat hak atas tanah di Kabupaten BatuBara dari Tahun 2009 sampai 2013**
- 3. Tabel 3 .Kasus Sengketa Tanah di Wilayah Hukum Kabupaten Batu Bara per 31 Desember 2014**

